

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1040>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 556-568

Research Article

Implementasi Kebijakan Fiskal Negara Islam Arab Saudi Dan Emirat Arab

Suradi¹, Yadi Janwari², Sofyan Al-Hakim³

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; suradi34@yahoo.co.id 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 21, 2023
Accepted : March 15, 2024

Revised : February 28, 2024
Available online : April 26, 2024

How to Cite: Suradi, Yadi Janwari and Sofyan Al-Hakim (2024) "Implementation of Fiscal Policy of the Islamic State of Saudi Arabia and the Arab Emirates", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 556-568. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1040..

Implementation of Fiscal Policy of the Islamic State of Saudi Arabia and the Arab Emirates

Abstract. This research aims to analyze the economic policies of Saudi Arabia and the Arab Emirates in anticipating the effects of fiscal policy on their national economies. These policies include international economic policy, fiscal policy, and monetary policy. This research uses qualitative research methods through scientific observation by collecting non-numerical data, focusing on creating solutions and meaningfulness. The results of the research show that there are efforts by the Kingdom of Saudi Arabia in its international economic policy. On the other hand, monetary policy is needed to stabilize the economy by supporting solid fiscal policy when the global world is flooded with liquidity such as nominal interest rates that are close to or below zero, so that the impact of lowering interest rates can trigger an outflow of cash from the stock market. In this case, the Kingdom of Saudi Arabia was very quick and responsive in implementing the combination of these policies. Meanwhile, the United Arab Emirates government is taking strategic steps, including in tax policy. This country

issues various regulations related to taxation in terms of collecting tax funds and using tax funds through the state budget.

Keywords: Fiscal Policy, Saudi Arabia, Arab Emirates

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan ekonomi Arab Saudi dan Emirat Arab dalam mengantisipasi efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian nasional-nya. Kebijakan-kebijakan ini mencakup kebijakan ekonomi internasional, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi ilmiah dengan mengumpulkan data non-numerik, dengan berfokus pada penciptaan solusi dan kebermaknaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya kerajaan Arab Saudi dalam kebijakan ekonomi internasionalnya. Di lain pihak, kebijakan moneter diperlukan untuk menstabilkan perekonomian dengan mendukung kebijakan fiskal yang solid ketika dunia global ddibanjiri likuiditas seperti tingkat bunga nominal yang mendekati atau di bawah nol, sehingga berdampak pada penurunan suku bunga dapat memicu keluarnya uang tunai dari pasar saham. Dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi sangat cepat dan tanggap dalam menjalankan kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan pemerintah Uni Emirat Arab mengambil langkah strategis, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Negara ini menerbitkan berbagai aturan terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaan dana pajak melalui anggaran negara.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Arab Saudi, Emirat Arab

PENDAHULUAN

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) adalah dua negara Islam yang memiliki kesamaan dari sisi geografis, budaya, agama, dan ketergantungan fiskal pada sektor migas. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal implementasi kebijakan fiskal di masing-masing negara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, konsep syariah dan zakat berperan penting dalam penetapan kebijakan fiskal di kedua negara (Nechi, Salem (2020: 67).

Arab Saudi merupakan produsen minyak mentah terbesar di dunia dengan sektor minyak yang menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara dan 85% ekspor. Di sisi lain, meskipun lebih kecil, kontribusi minyak dan gas terhadap perekonomian UEA juga cukup signifikan, yakni sekitar 30% PDB. Kondisi ini menyebabkan kedua negara rentan terhadap gejolak harga komoditas, yang selanjutnya berdampak pada fiskal masing-masing. (Nechi, Salem (2020: 167).

Penelitian ini berupaya menganalisis perbandingan implementasi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh dua negara Islam pengekspor minyak utama dunia, yaitu Arab Saudi dan UEA. Hal ini penting untuk memahami tantangan dan implikasi fiskal yang dihadapi oleh negara-negara kaya akan migas. Studi juga akan mengeksplorasi peranan prinsip-prinsip Islam dalam penetapan kebijakan fiskal di masing-masing negara.

Sebagai dua kekuatan utama OPEC, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki peran vital dalam industri minyak dunia. Keduanya menguasai cadangan minyak mentah terbesar di dunia dengan total sekitar 50 miliar barel atau 30% dari total OPEC. Dominasi mereka dalam produksi dan ekspor minyak global tak terbantahkan. Ekspor minyak telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Arab Saudi maupun UEA. Namun demikian, volatilitas harga emas hitam ini juga membuat kedua

negara rentan terhadap guncangan eksternal. Anjloknya harga minyak sejak 2014 telah memberikan tekanan besar pada posisi fiskal dan neraca pembayaran keduanya.

Untuk mengatasi tantangan ini, baik Arab Saudi maupun UEA telah dan terus berupaya melakukan berbagai reformasi kebijakan fiskal. Langkah-langkah seperti pengurangan subsidi BBM, peningkatan penerimaan pajak dari sektor non-migas, hingga privatisasi perusahaan negara, menjadi agenda penting. Tujuannya tentu untuk memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang kedua negara di masa pasca-minyak kelak.

Studi mendalam terkait reformasi kebijakan fiskal di Arab Saudi dan UEA ini penting untuk memberikan pembelajaran bagi negara-negara pengekspor sumber daya alam lainnya. Analisis juga akan melihat bagaimana nilai-nilai syariah mewarnai kerangka fiskal kedua negara Islam ini.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi yang parah pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan memutuskan untuk meningkatkan pinjaman dan membelanjakan lebih banyak pengeluaran di sektor infrastruktur. Secara teoritis peningkatan pengeluaran pemerintah ini memberikan suntikan dana ke dalam perekonomian dan membantu menciptakan lapangan kerja. Serta akan menyebabkan munculnya efek multiplier di mana injeksi awal ke dalam ekonomi menghasilkan dampak lebih lanjut dari pengeluaran yang lebih tinggi tersebut. Peningkatan permintaan agregat itu sendiri dapat membantu perekonomian keluar dari resesi. Jika pemerintah merasa bahwa inflasi adalah suatu masalah maka mereka dapat mengejar kebijakan fiskal deflasioner (pajak yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah) dalam rangka mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter disatu sisi lebih efektif diterapkan dengan menetapkan tingkat suku bunga setiap bulan. Keputusan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah mungkin membutuhkan waktu untuk memutuskan ke mana harus mengeluarkan uang. Namun, resesi keuangan global tahun 2007 menunjukkan bahwa kebijakan moneter juga dapat memiliki banyak keterbatasan diantaranya:

- a. Target inflasi terlalu sempit. Selama periode 2000-2007, inflasi rendah tetapi bank-bank sentral mengabaikan ledakan yang tidak berkelanjutan di pasar perumahan dan pinjaman bank.
- b. Perangkap likuiditas. Dalam resesi, pemotongan suku bunga mungkin terbukti tidak cukup untuk meningkatkan permintaan karena bank tidak ingin meminjamkan dan konsumen terlalu khawatir untuk berbelanja. Pada bulan Maret 2009 suku bunga dipotong dari 5% menjadi 0,5% tetapi ini ternyata tidak menyelesaikan resesi yang terjadi di Inggris. Bahkan pelonggaran kuantitatif berupa pencetakan uang mungkin tidak efektif lagi jika bank hanya ingin menyimpan uang ekstra di neraca mereka.

Pengeluaran pemerintah secara langsung menciptakan permintaan dalam perekonomian dan dapat menjadi langkah awal untuk mengeluarkan perekonomian dari resesi. Jadi dalam resesi yang parah yang hanya mengandalkan kebijakan moneter, mungkin tidak cukup untuk mengembalikan keseimbangan dalam perekonomian. Dalam perangkap likuiditas, kebijakan fiskal ekspansif tidak akan

menyebabkan crowding out karena pemerintah menggunakan penghematan surplus untuk mendorong terjadinya permintaan dalam perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi ilmiah dengan mengumpulkan data non-numerik, dan berfokus pada pembuatan makna. Hal ini dilakukan melalui studi kasus yang terjadi, observasi langsung pada kebijakan ekonomi yang berupa kebijakan ekonomi internasional, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam menerapkan kebijakan fiskal. Jenis penelitian kualitatif menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa atau bagaimana suatu fenomena tertentu dapat terjadi serta seberapa sering hal itu terjadi. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan di banyak disiplin ilmu, dengan berfokus terutama pada elemen manusia dari rumpun ilmu sosial dan ilmu alam. (Babbie, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teori yang menjelaskan secara detail tentang efektifitas kebijakan yang seharusnya dilaksanakan pemerintah dan bank sentral dalam upaya mengantisipasi resesi ekonomi.

Permintaan agregat atau Aggregate Demand (AD) dapat dihasilkan melalui pendapatan yang ditransfer ke segmen pengeluaran sebagai konsekuensi dari aliran sirkuler pendapatan. Sedangkan pendapatan ini biasanya dihabiskan untuk keperluan konsumsi barang dan jasa (Consumption/C) ditambahkan pengeluaran untuk barang modal oleh perusahaan (Investment/I). Sementara pengeluaran (G) dihasilkan oleh pemerintah ketika mengalokasikan sumber daya untuk barang publik dan transfer pendapatan, termasuk diantaranya dana pensiun. Demikian juga dengan pengeluaran luar negeri netto (X) yang merupakan pengeluaran luar negeri untuk ekspor barang dan jasa suatu perekonomian dimanalebih sedikit dari yang dihabiskan dalam suatu perekonomian daripada keperluan impor (M) barang dan jasa.

Model permintaan agregat dan penawaran agregat (AD-AS) menyediakan kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana tingkat AD dan AS merespon perubahan tingkat harga, serta bagaimana perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat mempengaruhi output nasional ekonomi dan tingkat harga. Terlepas dari komponen impor komponen AD berbanding terbalik dengan harga. Setiap komponen merespon secara berbeda terhadap perubahan harga. Dengan kata lain mereka memiliki elastisitas yang berbeda sehubungan dengan tingkat harga. Sebagai contoh, kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan luar negeri elastis terhadap harga karena konsumen luar negeri dapat memilih dari banyak pemasok global. Hal ini yang membuat mereka sangat sensitif terhadap perubahan harga produk-produk impor. Kurva AD menunjukkan hubungan antara AD dan tingkat harga. Dimana diasumsikan bahwa kurva AD akan miring ke bawah dari kiri ke kanan. Ini karena semua komponen AD, kecuali impor, berbanding terbalik dengan tingkat harga. Kurva AD miring ke bawah karena komponen AD berbanding terbalik dengan tingkat harga. Perubahan harga memiliki sejumlah pengaruh penting pada perilaku agregat rumah tangga dan perusahaan (Mankiw, 2006).

Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah berupa perubahan pada tingkat pengeluaran pemerintah atau tingkat pajak. Untuk meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran sebagai konsekwensinya berdampak pada tingginya defisit anggaran. Sebaliknya untuk mengurangi permintaan dan mengurangi inflasi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak dan memangkas pengeluaran sehingga menyebabkan defisit anggaran yang lebih kecil (Hommes, et.al., 2020).

Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter yang terdiri dari penetapan suku bunga dasar dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya Bank Sentral dapat menetapkan target inflasi sebesar 2%. Akan tetapi jika diprediksi bahwa inflasi akan melampaui target inflasi karena pertumbuhan ekonomi terlalu cepat maka mereka akan menaikkan tingkat suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi belanja konsumen dan investasi yang mengarah ke permintaan agregat yang lebih rendah dan inflasi yang lebih rendah. Sebaliknya jika ekonomi mengalami resesi maka Bank Sentral akan memangkas suku bunga.

Efektifitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan moneter menjadi lebih populer karena kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Sentral, yang mana pengaruh politik tidak terlalu signifikan dalam pelaksanaannya. Misalnya saja politisi tidak mudah memangkas suku bunga disebabkan keinginan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi berkembang sedang pesat sebelum memasuki pemilihan umum.

Selain itu kebijakan fiskal dapat memiliki lebih banyak efek samping pada sisi penawaran dalam skala perekonomian yang lebih luas. Misalnya, untuk mengurangi tingkat inflasi, penerapan piranti kebijakan yaitu pajak yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah tidak akan menjadi populer, dan pemerintah boleh jadi tidak tertarik menerapkan kebijakan ini. Terutama pengeluaran pemerintah yang lebih rendah justru dapat menyebabkan berkurangnya fasilitas layanan publik, dan pajak penghasilan yang lebih tinggi dapat menciptakan disinsentif untuk bekerja (Kuttner, 2002).

Moneteris berpendapat bahwa kebijakan fiskal ekspansif dengan asumsi defisit anggaran yang lebih besar kemungkinan akan menyebabkan crowding out yaitu pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan mengurangi pengeluaran sektor swasta. Dan pinjaman pemerintah yang lebih tinggi mendorong kenaikan tingkat suku bunga. Sebagai contoh konkret, kebijakan fiskal ekspansif pada pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi malahan tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pengambil kebijakan, justru mendorong pengeluaran yang tidak efektif sehingga pada gilirannya sulit meminimalisir efek crowding out tatkala resesi ekonomi sudah berakhir (Clarida, 2002).

Kebijakan Ekonomi Internasional Kerajaan Arab Saudi

a) Liberalisasi perdagangan dan investasi

Arab Saudi telah secara bertahap membuka ekonominya untuk perdagangan

dan investasi asing. Mereka bergabung dengan WTO pada tahun 2005 yang memaksa mereka untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Saudi juga menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang utamanya. Hal ini dirancang untuk menarik investasi asing langsung ke sektor non-minyak Saudi.

b) Privatisasi perusahaan negara

Arab Saudi mulai melakukan privatisasi perusahaan milik negara terutama di sektor telekomunikasi, listrik, air, dan transportasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan layanan lebih baik dengan membawa sektor swasta. Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional, juga direncanakan untuk sebagian privatisasi.

c) Pengembangan sektor swasta non-minyak

Pemerintah telah berupaya mendorong pertumbuhan sektor swasta di luar minyak, terutama dalam pariwisata, infrastruktur, keuangan, real estat, dan teknologi. Ini termasuk dukungan keuangan, deregulasi, dan penyederhanaan birokrasi untuk bisnis kecil dan menengah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan menciptakan lapangan kerja.

d) Pemotongan subsidi

Arab Saudi secara bertahap memangkas subsidi bahan bakar dan listrik yang memberatkan anggaran negara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban fiskal sambil mendorong efisiensi dan hemat energi.

Itulah beberapa kebijakan ekonomi internasional utama yang diimplementasikan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, kebijakan ini dirancang untuk melakukan reformasi struktural ekonomi Saudi dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada minyak dan mempersiapkan masa depan pasca-minyak.

Negara Arab Saudi sangat menghargai gerakan kemanusiaan yang sangat dermawan ini yang mana akan berkontribusi secara signifikan pada upaya untuk melindungi kesehatan ekonomi global. Dan hal ini merupakan pengamalan yang baik dari ayat Al-Qur'an dimana Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

... berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS.An Nur: 33).

Ayat ini menegaskan bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wata'ala dan kita wajib menginfakkannya terutama disaat diperlukan dan dalam mewujudkan

mashlahat individu dan masyarakat. Di dalam negeri sendiri pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa kasus virus korona terus menerus diidentifikasi dan mengalami peningkatan hingga 1104 kasus (data wordometer, sehingga berdampak pada penangguhan perjalanan melalui udara dan laut menuju Arab Saudi serta larangan keluar malam selama 21 hari untuk mencegah penyebaran penyakit. Sementara itu juga diumumkan bahwa orang-orang yang memberikan informasi yang tidak benar terkait kesehatan di pintu masuk akan membayar denda hingga SAR133.000 (KSA's Ministry of Interior, 2020).

Dalam perspektif ekonomi, resesi yang parah kemungkinan akan terjadi, bahkan dapat dilihat pada dampak di Indonesia melalui pergerakan kurs rupiah yang sudah sangat mengkhawatirkan dan beberapa ekonom telah menyerukan pemerintah untuk memperkenalkan langkah-langkah dalam rangka mendorong permintaan agregat. Merujuk pada teori Keynes, penurunan dalam permintaan agregat dapat menyebabkan perekonomian hancur. Tetapi di satu sisi rekomendasi teori ini tidak memadai, mengingat bahwa ekonomi global mengalami guncangan pada sisi supply yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada faktanya orang-orang tidak berada di tempat kerja karena mereka sakit atau dikarantina. Dalam situasi seperti itu, tingginya permintaan hanya akan mendorong inflasi, yang berpotensi mengarah pada stagflasi dimana pertumbuhan GDP yang lemah atau turun bersamaan dengan kenaikan harga, seperti yang terjadi selama krisis minyak tahun 1970-an (Barro, 1987).

Parahnya, langkah-langkah yang menargetkan perbaikan pada sisi permintaan bahkan bisa menjadi kontraproduktif, karena implikasi teori ini akan mendorong kontak sosial, sehingga merusak upaya untuk membatasi penularan virus. Suatu hal yang kontradiktif ketika pemerintah Italia memberikan rakyatnya uang untuk berbelanja namun disaat yang sama pemerintah menutup toko dan memaksa semua orang untuk tinggal di rumah.

Kebijakan Fiskal Kerajaan Arab Saudi

Ahli epidemiologi memandang perlunya penurunan drastis dalam aktifitas ekonomi, malah bertentangan dengan tinjauan ekonomi karena dapat mengakibatkan jatuhnya pasar saham. Berkaitan erat dengan kebijakan bank sentral tentang penurunan tingkat suku bunga hingga mendekati nol dan penundaan pembayaran utang akan menyebabkan bubble ekonomi yang tidak berkesudahan karena mereka sebenarnya menggunakan kebijakan pada saat yang tidak tepat. Sebagai konsekwensinya bank sentral akan memikul tanggung jawab atas bubble ekonomi yang akan meledak kecuali jika didukung oleh kebijakan fiskal yang solid dari pemerintah (Friedman, 1960).

Dalam pelaksanaan teori ini sebagai respon pemerintah Arab Saudi terhadap pandemi virus corona, pihak Kerajaan benar-benar mengambil langkah-langkah fiskal serius untuk menyelamatkan perusahaan dan bank dari kebangkrutan, sehingga mereka dapat pulih dengan cepat insyallah begitu pandemi berakhir. Pembuat kebijakan secara teori harus mempertimbangkan berbagai bentuk keringanan pajak dan jaminan publik untuk membantu perusahaan sektor swasta meminjam dan menanggukan kewajiban terhadap pemerintah jika perlu. Dan pendekatan ini sedang diterapkan di Arab Saudi yang diantaranya berupa;

- 1) Pembebasan biaya bagi ekspatriat yang akan final exit yang mana iqama (izin tinggal) telah kadaluwarsa dari sekarang hingga 30 Juni 2020 serta diberikan keringanan memperpanjang iqama mereka dalam jangka waktu 3 bulan tanpa biaya.
- 2) Pengusaha juga dapat mengembalikan biaya visa kerja yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri yang mana belum digunakan oleh pengusaha tersebut setelah keluarnya larangan perjalanan entri dan exit ke Arab Saudi. Termasuk visa yang telah distempel di paspor mereka dapat memperpanjang kembali periode visa tersebut selama 3 bulan tanpa dikenakan biaya apapun.
- 3) Pemerintah mengizinkan pengusaha untuk memperpanjang visa exit dan re-entry yang tidak digunakan disebabkan larangan perjalanan dari Kerajaan Arab Saudi untuk jangka waktu 3 bulan tanpa biaya (KSA's Ministry of Interior, 2020).
- 4) Pengumuman ini juga memungkinkan pemilik bisnis dalam jangka waktu 3 bulan untuk menunda pembayaran PPN, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan dan pengajuan pernyataan Zakat dan pembayarankewajiban lainnya.
- 5) Pembayaran beberapa kewajiban sektor swasta berupa biaya layanan pemerintah, biaya kementrerian tata kota (baladiyah) ditunda dalam jangka waktu 3 bulan, serta menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terpengaruh oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak. (KSA's Ministry of Municipal and Rural Affairs, 2020)
- 6) Menteri Keuangan berhak untuk memberikan pinjaman (tentu saja melalui persetujuan raja) dalam bentuk pembiayaan terkait lainnya serta pembebasan dari pembayaran biaya dan pengembalian pinjaman yang diberikan sampai akhir tahun 2020 dalam inisiatif program keberlanjutan perusahaan.
- 7) Menunda pengumpulan bea masuk impor dalam jangka waktu 30 hari terhadap pengajuan jaminan bank untuk tiga bulan ke depan dan menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terimbas oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak (KSA's Ministry of Finance, 2020).

Secara spesifik kebijakan fiskal Arab Saudi dapat dilihat dari fakta bahwa pendapatan negara sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Hampir 80% pendapatan pemerintah Arab Saudi berasal dari sektor minyak. Oleh karena itu, kebijakan fiskal Saudi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak.

Arab Saudi melakukan kebijakan anggaran ekspansif ketika harga minyak tinggi. Mereka banyak mengeluarkan dana untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai subsidi. Namun pada tahun 2015, dengan anjloknya harga minyak, Saudi terpaksa melakukan pemotongan anggaran dan pengurangan subsidi. Pemerintah telah berupaya melakukan diversifikasi ekonomi dan pendapatan fiskal melalui pajak baru, seperti pajak nilai tambah/PPN sejak 2018. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan anggaran negara pada sektor minyak.

Pemerintah menggenjot investasi asing dan domestic untuk mendorong pertumbuhan sektor non-minyak seperti infrastruktur, pariwisata, konstruksi, dll. Hal ini untuk meningkatkan penerimaan pajak di luar minyak.

Menaikan harga BBM, listrik, dan air untuk mengurangi tekanan subsidi pada

anggaran pemerintah. Selain itu, negara juga berencana untuk memprivatisasi sejumlah perusahaan milik negara. Demikian sekilas gambaran mengenai beberapa kebijakan fiskal utama Arab Saudi. Secara umum kebijakan fiskal Saudi saat ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak dan memperkuat keberlangsungan fiskal jangka panjang.

Kebijakan Fiskal Uni Emirat Arab (UEA)

Dalam lingkup kehidupannya manusia hidup bersama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar akan terjelma ke dalam suatu wadah negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk. Satu diantaranya adalah pajak.

Pajak pada mulanya adalah upeti, yang merupakan pemberian bersifat cuma-cuma, tetapi bersifat wajib, yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). Rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk hasil tanam atau ternak untuk keperluan (kepentingan) penguasa setempat. Upeti demikian tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan ke rakyat karena untuk kepentingan sepihak dan adanya tekanan psikologis karena kedudukan atau status sosial raja yang lebih tinggi dibandingkan rakyatnya.

Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang diberikan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pertanian, juga untuk membangun sarana sosial lainnya seperti taman.

Seiring perkembangan masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan. Untuk memenuhi unsur keadilan itulah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Rochmat Soemitro berpendapat, pajak merupakan gejala masyarakat yang berarti bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat, jika tidak ada masyarakat tidak ada pajak. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang) dengan tujuan tertentu. Desa, Nagari dan Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan bersama.

Kelangsungan hidup negara berarti kelangsungan hidup masyarakat. Kehidupan negara berbeda dengan kehidupan individu walaupun sama-sama memerlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban sendiri dan berasal dari penghasilan individu.

Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan negara merupakan penghasilan yang berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan kekayaan alam yang ada dalam suatu negara.

Pajak merupakan sumber utama anggaran negara dalam membiayai

pengeluaran pemerintah. Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara PJA Adriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Perpajakan adalah mekanisme transfer wajib sumber daya di antara anggota masyarakat yang dikoordinir oleh pemerintah. Kebijakan pajak berkaitan dengan bagaimana masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan dan penggunaan dana pajak, sehingga kebijakan pajak mempertimbangkan aspek teknis dan hukum, politik, sosial, dan budaya. Dengan adanya Undang-undang Perpajakan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk fungsi kontrol, mengatur dengan menyatukan dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan negara. Pemerintah biasanya menggunakan sumber daya yang dikumpulkan dari masyarakat wajib pajak untuk mendanai barang dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, sistem pemberian layanan Kesehatan.

Teori standar perpajakan optimal menyatakan bahwa kebijakan pajak harus mampu memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Kebijakan pajak optimal memposisikan pemerintah sebagai utilitarian, yaitu sebagai fungsi kesejahteraan sosial berdasarkan utilitas individu dalam masyarakat dan distribusi utilitas yang merata. Teori manfaat (*benefit theory*) menyatakan bahwa individu harus berkontribusi kepada negara sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari negara. Masyarakat terbentuk terlibat dalam proyek pemerintah secara bersama.

Secara kolektif, adanya perubahan signifikan kebijakan pemerintah. Pilihan instrumen dan alokasi dana yang diperlukan membentuk penganggaran pemerintah dengan tujuan keseimbangan dan kelangsungan perekonomian negara. Secara bertahap mempertahankan aktifitas ekonomi dan fungsi kontrol pengeluaran keuangan dan manajerial. Teori kontrol mengidentifikasi bahwa strategi mitigasi pandemi yang optimal untuk mencapai kekebalan masyarakat dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan melalui pengenalan langkah- langkah pengendalian sosial seperti menutup sekolah, membatasi jam kerja, membatasi batasan pengisian ruangan, menjaga jarak sosial, dan batasan fraksi populasi yang terinfeksi (karantina).

Teori ekonomi politik dinamis berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait belanja publik, perpajakan dan utang. Aturan dibuat oleh legislatif untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai barang publik nasional termasuk ketika terjadi guncangan seperti perang atau bencana alam. Dalam jangka panjang, kebijakan pajak ekuilibrium yang seimbang dengan tidak fluktuatif, dengan mempertimbangkan batasan tingkat utang sehingga mampu menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat.

Ioana-Laura Tibulca (2021) membuktikan bahwa penurunan pendapatan pajak pada tahun 2020 dan 2021 diikuti oleh sedikit pemulihan pada tahun 2022 untuk sebagian besar negara anggota Uni Eropa. Studi ini juga menawarkan rekomendasi

kebijakan fiskal untuk UE yang bertujuan untuk meningkatkan dan menstabilkan pengumpulan penerimaan pajak di masa depan.

Kebijakan Pajak dan Keuangan Publik Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab sejak 1973 telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak di gurun menjadi negara modern dengan taraf kehidupan yang tinggi. Ia merupakan negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas yaitu 33% dari GDP negara itu. Ekonomi Emirat adalah kedua terbesar di dunia Arab sesudah Arab Saudi dengan Pendapatan Domestik Bruto 570 miliar dollar (AED 2,1 triliun).

Cadangan minyak dan gas alam Emirat, masing-masing adalah yang terbesar keenam dan ketujuh dunia. Penguasa dan presiden pertama Emirat, Zayed bin Sultan AnNahyan mengawasi perkembangan negara dengan menginvestasikan pendapatan minyak ke dalam perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pada abad 21 ini, Emirat menjadi kurang bergantung pada minyak dan gas dan secara ekonomi berfokus pada pariwisata dan bisnis. Pemerintah tidak memungut pajak penghasilan, meskipun ada pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai 5% yang ditetapkan pada tahun 2018.

Pemerintah menerbitkan paket fiskal lain senilai USD 7,2 miliar untuk percepatan proyek infrastruktur, subsidi air dan listrik. Pemerintah memberikan jaminan kredit dan dukungan likuiditas. Selain itu, pemerintah memberikan rabat untuk pembayaran sewa komersial di sektor pariwisata karena Uni Emirat Arab juga menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi.

UEA tidak memungut pajak penghasilan individu maupun pajak penghasilan badan. Negara mengandalkan pendapatan dari sektor minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan negara. Pemerintah menetapkan pajak atas penjualan minuman keras, rokok, hotel, dan barang mewah. Tarif pajaknya sekitar 5-10%. Selain itu ada bea masuk 2-5% dan bea ekspor sebesar 5%. UEA menerapkan Pajak Nilai Tambah/PPN sebesar 5% pada sebagian besar barang dan jasa. PPN menjadi sumber pendapatan domestik terbesar pemerintah setelah sektor migas.

Pada 2018 UEA meluncurkan pajak baru yaitu Cukai Nilai Tambah (VAT) sebesar 5% untuk meningkatkan pendapatan non-migas jangka panjang. Target penerimaannya 12 miliar AED per tahun. UEA memiliki dana kekayaan negara (sovereign wealth funds/SWF) terbesar di dunia yakni Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) senilai lebih \$700 miliar. SWF dimanfaatkan untuk investasi domestik dan global.

Belanja infrastruktur, subsidi energi dan bahan pokok, serta pertahanan menjadi pengeluaran publik terbesar di UEA. Pemerintah terus menggenjot proyek-proyek publik untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik. Meski tidak memungut pajak penghasilan, UEA tetap memastikan warganya membayar zakat yang merupakan kewajiban agama. Zakat dikelola oleh Dewan Tertinggi Zakat melalui sejumlah otoritas zakat lokal. Penerimaan zakat digunakan untuk beragam program sosial.

Selain PPN dan VAT, sumber penerimaan domestik lainnya berasal dari cukai

tembakau dan otomotif. Tarif cukai rokok misalnya bisa mencapai 100% dari harga eceran. Sementara cukai kendaraan variatif berdasar jenis dan harga kendaraan.

Meski memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, UEA juga banyak mengimpor minyak dan gas dari Arab Saudi untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang terus meningkat tajam. Pemotongan subsidi listrik dan BBM yang dimulai pada 2015 telah menghemat pengeluaran fiskal UEA hingga 14 miliar dolar setahun. Langkah ini juga mendorong konsumsi energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. UEA memiliki utang publik yang relatif rendah yakni kurang dari 30% dari PDB, jauh di bawah ambang internasional sebesar 60%. Kondisi fiskal UEA jauh lebih sehat dibanding Arab Saudi yang utangnya telah melampaui 90% PDB.

KESIMPULAN

Kerajaan Arab Saudi dalam kebijakan internasionalnya yaitu memberikan bantuan kepada Lembaga-lembaga ekonomi global. Dan dalam kebijakan fiskalnya yang sangat strategis, kerajaan langsung melakukan intervensi yang sigap dan cepat dalam menaikkan anggaran pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak di saat-saat yang genting. Demikian halnya dengan dukungan likuiditas. Ketika dunia sudah dibanjiri dengan likuiditas, tingkat bunga nominal mendekati atau bahkan di bawah nol hampir di mana-mana. Hal ini menyebabkan lebih banyak pemotongan tingkat suku bunga hingga sampai ke zona merah tua yang justru memicu pergerakan keluarnya uang cash dari pasar saham. Pengambil kebijakan ekonomi tidak boleh mengabaikan kebijakan moneter namun tetap diperlukan adalah dukungan dari kebijakan fiskal yang solid. Pemerintah Uni Emirat Arab juga sama memiliki kebijakan fiskal strategis, termasuk dalam kebijakan perpajakan dan keuangan publik. Negara ini menerbitkan berbagai aturan terkait perpajakan dari sisi pengumpulan dana pajak dan penggunaandana pajak melalui anggaran negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshehry, A.S. dan Belloumi, M. (2015). "Energy consumption, carbon dioxide emissions and economic growth: the case of Saudi Arabia". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.
- Alshebel, Abdullah, Sikki, Kaisar Lahiya, Posumah, Bayu Taufik (2019). "The Impact of Islamic Banking Credits on Saudi Arabia's Economic Growth". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. <https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/128-vol-9-iss-6>. Volume 9, Issue 6. Pages 1-24.
- Babbie, Earl (2014). "The Basics of Social Research" (6th ed.). Belmont, California: Wadsworth Cengage. pp. 303-4. ISBN 9781133594147. OCLC 824081715.
- Barro, Robert J. (1987). "Macroeconomics" 2nd edition. MIT Press
- Berg, Bruce Lawrence; Lune, Howard (2012). "Qualitative Research Methods for the Social Sciences" (8th ed.). Boston. p. 3. ISBN 9780205809387. OCLC 732318614.
- Bernanke, Ben (2006). "Monetary Aggregates and Monetary Policy at the Federal Reserve: A Historical Perspective". The Federal Reserve.
- Charlene Gubash and Reuters. "Saudi Arabia to convene virtual G-20 summit on

- coronavirus “. <https://www.nbcnews.com/health/health-news/live-blog/coronavirus-updates-global-cases-approach-200-000-lockdown-becomes-new-n1162561/ncrd1162566#liveBlogHeader>.
- Clarida, Richard; Gali, Jordi; Gertler, Mark (2002). "A simple framework for international monetary policy analysis". *Journal of Monetary Economics*. 49 (5): 879–904. CiteSeerX 10.1.1.591.9773.doi: 10.1016 / S0304-3932 (02) 00128-9.
- Friedman, Milton (1960). "A Program for Monetary Stability". Fordham University Press.
- Goran Petrevski, Borce Trenovski & Biljana Tashevskaja (2019) The effectiveness of fiscal and monetary policies in a small open economy – the case of Macedonia, *Post-Communist Economies*, 31:6, 805-821, DOI: 10.1080/14631377.2019.1607437
- Hertog, Steffen (2013). "The private sector and reform in the Gulf Cooperation Council". LSE Kuwait Programme Paper Series. London School of Economics.
- Sdravovich et al. (2014). "Subsidy Reform in the Middle East and North Africa". IMF.
- Hans-Werner Sinn. "How best to fight the economic impact of the coronavirus pandemic". <https://www.theguardian.com/business/2020/mar/17/how-best-to-fight-the-economic-impact-of-the-coronavirus-pandemic>.
- Hansen, Bent (2003). "The Economic Theory of Fiscal Policy", Volume 3. Routledge. <https://twitter.com/saudimomra/status/1240989970929725443>
<https://www.who.int/csr/don/archive/country/sau/en/>
- Kuttner, K. N. (2002, October). The monetary-fiscal policy mix: Perspectives from the U.S. Prepared for the Conference on The Monetary Policy Mix in the Environment of Structural Changes, National Bank of Poland, Warsaw.
- Khan, Majid (2021). "Political Economy of Gulf Sovereign Wealth Funds". Palgrave Macmillan.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Macroeconomics* 7th edition. New York.
- Ministry of Municipal and Rural Affairs. "G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Hold Virtual Meeting".
- Ministry of Finance. "With More Than SAR 120 bn: Government of Saudi Arabia Implements Urgent Measures to Mitigate the Impact of Coronavirus on Economic Activities and Private Sector". https://www.mof.gov.sa/en/MediaCenter/news/Pages/News_20032020.aspx
- Nechi, Salem (2020). "Economic Diversification Policies in Saudi Arabia and UAE Since 1970s". *Routledge Studies in Middle Eastern Economies*. Routledge.
- Partington, Richard; Wearden, Graeme (9 March 2020). "Global stock markets post the biggest falls since the 2008 financial crisis". *The Guardian*. ISSN 0261-3077. Archived from the original on March 14, 2020. Retrieved March 15, 2020.